

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan beberapa upaya dalam memenuhi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah telah mengadakan program pelatihan yang disesuaikan dengan kompetensi penyandang disabilitas serta penyaluran tenaga kerja disabilitas ke sektor-sektor pekerjaan yang relevan. Selain itu, pemerintah juga memberikan program pemberian modal usaha untuk membuka peluang wirausaha bagi penyandang disabilitas. Dalam menjalankan perannya, pemerintah bekerja sama dengan LSM yang memiliki fokus dalam isu disabilitas, melalui kegiatan seperti kajian, audiensi, dan penjangkaran penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan penerapan program.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hambatan dalam pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas, yaitu kurangnya kesadaran penyandang disabilitas terhadap pentingnya pendidikan dan pekerjaan dalam mencapai kehidupan yang mandiri. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pekerjaan perlu ditingkatkan agar penyandang disabilitas dapat mengoptimalkan potensi diri dan memperoleh hak pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kebijakan dan program yang mendukung inklusi dan pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: hak pekerjaan, inklusi, peran, penyandang disabilitas, tenaga kerja disabilitas.

ABSRACK

This research aims to investigate the role of the government in providing employment rights for people with disabilities in Kulon Progo Regency. A qualitative approach was employed, involving in-depth interviews and direct observations.

The findings indicate that the Kulon Progo Regency government has implemented several efforts to fulfill the employment rights of people with disabilities. The government has conducted training programs tailored to the competencies of individuals with disabilities and facilitated their placement in relevant sectors. Additionally, the government has initiated business capital programs to create entrepreneurial opportunities for people with disabilities. In carrying out these responsibilities, the government collaborates with non-governmental organizations (NGOs) that focus on disability issues, through activities such as studies, consultations, and identification of individuals with disabilities, to optimize the implementation of programs.

However, the research identifies barriers to the fulfillment of employment rights for people with disabilities, including a lack of awareness among individuals with disabilities about the importance of education and employment in achieving independent living. Raising awareness regarding the significance of education and employment is crucial to enable individuals with disabilities to maximize their potential and attain suitable employment opportunities aligned with their abilities.

This research is expected to provide a deeper understanding of the government's role in ensuring employment rights for people with disabilities in Kulon Progo Regency. The implications of this study are intended to be utilized by local governments and relevant stakeholders to enhance policies and programs that support inclusivity and the fulfillment of employment rights for people with disabilities.

Keywords: employment rights, inclusivity, role, people with disabilities, disabled workforce.